

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah *et al.* 2021. "Gratification; corruption, regional leader, and state financial loss." *International Journal of Entrepreneurship* 25 (2): 1–10.
- Anwar, Saiful. 2017. "Analisis Penetapan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasus Korupsi Dana Hibah Pemerintah Daerah kepada KONI)." *Accounting and Business Information Systems Journal* 5 (2): 18.
- Astuti, Chandra Ayu, dan Anis Chariri. 2015. "Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi." *Diponegoro Journal of Accounting* 4 (4): 11–22.
- DetikNews. 2020. "Bukan Rp 60 M, Hakim Sebut Dirut PT CMIT Korupsi Rp 15 M di Proyek Bakamla," 2020.
- . 2021. "Penjelasan Jaksa KPK soal Beda Jumlah Kerugian Negara RJ Lino," 2021.
- Ferdian *et al.* 2018. "Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Syiah Kuala Law Journal* 2 (3): 320–37. <https://doi.org/10.24815/sklj.v2i3.11648>.
- Hayes *et al.* 2005. *Principles of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing*. Person Education Limited (UK).
- Hayes *et al.* 2005. "Principal of Auditing: An Introduction to International Standards on Auditing Second Editon," 6–700.
- Helmi *et al.* 2020. "The Competency of Administrative Court in Adjudicating State Financial Losses Report Dispute in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 4 (1): 41. <https://doi.org/10.28946/slrev.vol4.iss2.298.pp41-51>
- ICW. 2021. "Kerugian Negara Akibat Korupsi yang Ditangani KPK Turun pada 2020."
- Kompas. 2022. "Beda Pendapat, Satu Hakim Nilai Penghitungan Kerugian Negara Rp 22,7 Triliun dalam Kasus Asabri Tak Tepat," 2022.
- Mahkamah Agung. 2020. "Putusan Mahkamah Agung No.35/Pidsus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst."
- Makawimbang, H.F. 2014. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Partohap, Timotius Hendrik, dan Rimawan Pradiptyo. 2015. "Who Cares of Anti Corruption Agency? An Assessment of Court Decisions for Corruption Cases in Indonesia Using Proportional Hazard Model." *SSRN Electronic Journal*, 1–36. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2593384>.
- Porter, Brenda A. 1990. "The audit-expectation-performance gap and the role of external auditors in society," 511.
- Ryketeng, M. 2020. "Faktor-Faktor Penyebab Perbedaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kasus Korupsi Dana Hibah Persiba Bantul)." *YUME: Journal of Management* 3 (1).
- Sianturi *et al.* 2015. "Calculating financial state losses due to corruption in Indonesia: Financial state losses in whoseeyes?" *Mediterranean Journal of*

- Social Sciences* 6 (3): 124–30. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n3p124>
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suta *et al.* 2021. “Determining State’s Financial Losses in Corruption: An Institutional Power and Constraint in Indonesia.” *Lentera Hukum* 8 (1): 95. <https://doi.org/10.19184/ejllh.v8i1.21923>.
- Thomas, G. 2016. *How to Do Your Case Study*. London: SAGE Publications.
- Tuanakotta, Theodorus M. 2009. “Menghitung Kerugian Keuangan Negara: Dalam Tindak Pidana Korupsi.” In , 1 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- . 2018. *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. 2 ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyono *et al.* 2019. “State financial losses in public procurement construction projects in Indonesia.” *Buildings* 9 (5): 1–8. <https://doi.org/10.3390/buildings9050129>.
- Yin, R.K. 2014. *Case Study Research Design and Methods*. USA: SAGE Publications.
- Zhang *et al.* 2017. “Causes of Business-to-Government Corruption in the Tendering Process in China.” *Journal of Management in Engineering* 33 (2): 05016022. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)me.1943-5479.0000479](https://doi.org/10.1061/(asce)me.1943-5479.0000479).

#### **Peraturan-peraturan :**

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.
- Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan.
- Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan  
Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.